



**PENGANTAR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI**

**ATAS
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG
KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disampaikan oleh : Taufiq Hidayat

Anggota Nomor :

Yang Terhormat Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Para Anggota DPR, Anggota DPD dan Hadirin yang saya muliakan

*Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua*

Izinkanlah kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya dalam kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua yang hadir dalam Rapat Kerja Komisi II ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan izin dan iradat-Nya lah kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Kerja Komisi II ini untuk mendengarkan pengantar fraksi-fraksi atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RUU yang sangat dinantikan oleh masyarakat Yogyakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Fraksi Partai Golkar diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang

demokratis, akuntabel dan efisien. Berkenaan dengan itu, bagi Fraksi Partai Golkar membahas RUU ini adalah upaya memberi makna sekaligus penguatan terhadap NKRI sebagai bagian dari amanat konstitusi kita dalam rangka memajukan kehidupan bernegara, menegakkan keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Dengan memperhatikan aspek sejarah bergabungnya Yogyakarta dengan Republik Indonesia, aspek yuridis, dan perkembangan dinamika masyarakat Yogyakarta, hendaknya RUU ini mampu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Yogyakarta pada khususnya maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya perkenankanlah, Fraksi Partai Golkar memberikan pengantar secara umum atas DIM RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut kami, terdapat beberapa masalah yang pantas dipertanyakan dan perlu dikaji secara mendalam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa hal itu perlu dikaji lebih lanjut dalam pembahasan RUU ini, apakah konsep itu merupakan formulasi terbaik bagi Yogyakarta dalam menjalankan pemerintahan istimewanya. Penggunaan nomenklatur Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama terkesan rancu sekaligus menunjukkan tidak konsistennya RUU ini. Menempatkan Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama juga seakan-akan memposisikan Sultan sebagai pimpinan negara bagian yang mempunyai kewenangan lain. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penggunaan nomenklatur tersebut.
2. Terhadap tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. DIM Rumusan Pemerintah menempatkan Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama tetapi di sisi lain juga membolehkan keduanya untuk berkompetisi memperebutkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama kerabat Kasultanan, kerabat Pakualaman dan masyarakat umum. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, bukankah dengan tata cara demikian justru akan menimbulkan ketegangan dan konflik di kalangan kerabat Kasultanan dan Pakualaman? Mengapa Pemerintah membuat rumusan yang seolah-olah mengusik ketenangan dan ketentraman masyarakat Yogyakarta?
3. Terhadap pelaksanaan urusan istimewa di bidang pertanahan dan tata ruang. Telah kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada hukum agraria nasional dan Undang-Undang

Tentang Tata Ruang. Oleh karenanya, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengapa untuk DIY di bidang pertanahan dan tata ruang perlu diatur secara khusus? Dan apa implikasinya jika Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai badan hukum?

Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Para Anggota DPR, Anggota DPD dan Hadirin yang saya muliakan

Demikianlah beberapa inventarisasi masalah yang saling berkait dengan rumusan-rumusan lainnya, sehingga menurut Fraksi Partai Golkar perlu dikaji bersama secara mendalam. Mengingat pentingnya Undang-Undang yang mengatur tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan **Bismillahirrahmaanirrahiim**, menyatakan **memahami** dan **menyetujui** agar **DIM RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas lebih lanjut**.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan Iman, mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dan didalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

*Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabaraakatuh.*

Jakarta, 23 Mei 2011

**Pimpinan Poksi II
Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Chairuman Harahap, SH., MH
No Anggota : A-178**